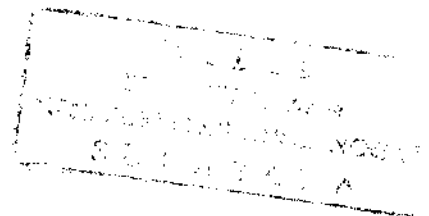


SKRIPSI

AMY YUDARANI

AKIBAT HUKUM BERAKHIRNYA BISNIS WARALABA (FRANCHISE)



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1998**

AKIBAT HUKUM BERAKHIRNYA BISNIS WARALABA (FRANCHISE)

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Pembimbing,



Sri Handajani, S.H. M.Hum

NIP. 130 809 069

Penyusun,



Amy Yudarani

NIM. 039413950

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
1998**

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a) Terbentuknya perjanjian waralaba adalah pada saat dilakukannya penandatanganan perjanjian waralaba oleh para pihak. Penandatanganan perjanjian dilakukan apabila Penerima Waralaba telah menyetujui klausula-klausula dalam perjanjian waralaba yang diajukan oleh Pemberi Waralaba. Dengan ditandatanganinya perjanjian waralaba berarti para pihak telah bersepakat dan terikat untuk melakukan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Selain itu dalam perjanjian waralaba juga harus ditentukan tentang jangka waktu berlakunya perjanjian.
- b) Suatu perjanjian waralaba dapat berakhir dengan dua cara, yaitu berakhir secara otomatis karena habis jangka waktu perjangiannya dan berakhir berakhirnya perjanjian sebelum habis jangka waktunya karena dikehendaki oleh para pihak. Apabila perjanjian waralaba berakhirarena habis jangka waktunya, maka harus ditetapkan dalam klausula-klausula dalam perjanjian bahwa Penerima Waralaba mempunyai hak untuk memperpanjang perjanjian waralaba. Sedangkan bila perjanjian waralaba berakhir sebelum habis jangka waktunya, maka harus ditentukan dalam kondisi apa suatu perjanjian waralaba dapat berakhir, baik oleh Pemberi Waralaba maupun oleh

Penerima Waralaba, agar para pihak dapat terhindar dari pengakhiran hubungan waralaba yang tidak adil.

- c) Setelah berakhirnya perjanjian waralaba, akan timbul akibat hukum putusnya hubungan waralaba antara para pihak. Putusnya hubungan waralaba itu juga akan berakibat dalam hal penggunaan merek milik Pemberi Waralaba oleh Penerima Waralaba, penggunaan bangunan Restoran dan fasilitas yang terdapat didalamnya dan masalah pembayaran uang waralaba. Selain itu, setelah berakhirnya perjanjian waralaba, Penerima Waralaba masih mempunyai kewajiban untuk tidak bersaing dengan Pemberi Waralaba selama jangka waktu tertentu.

2. Saran

- a) Dalam menandatangani perjanjian waralaba, hendaknya calon Penerima Waralaba berhati-hati dalam menentukan hak dan kewajiban yang seimbang agar pada pelaksanaan perjanjian tersebut tidak merugikan dirinya, karena kebanyakan dari perjanjian waralaba dibuat oleh Pemberi Waralaba untuk kepentingannya, dan tidak dimungkinkan adanya tawar-menawar terhadap klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian tersebut.
- b) Pada pasal 7 huruf h Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 259/MPP/KEP/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha waralaba ditetapkan bahwa

perjanjian waralaba harus memuat ketentuan-ketentuan pokok yang disepakati yang dapat mengakibatkan pemutusan perjanjian atau berakhirnya perjanjian. Akan tetapi, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat umum, sehingga ketentuan mengenai pengakhiran perjanjian waralaba ditentukan sendiri oleh pihak Pemberi Waralaba sebagai orang yang memiliki merek usaha waralaba, oleh karena itu pemerintah perlu diberlakukan legislasi yang spesifik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pengakhiran perjanjian yang tidak adil.

- c) Untuk Pemberi Waralaba, dalam menyusun klausula-klausula dalam perjanjian waralaba, hendaknya membuat klausula-klausula yang dapat melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual miliknya agar dapat terhindar dari penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak sah oleh Penerima waralaba dan agar dapat terhindar dari persaingan yang tidak jujur dari Penerima Waralaba setelah berakhirnya perjanjian waralaba.